

Nomor : 27791/D.3.1/10/2024 05 Oktober 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan tentang Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Sementara Tahun 2024 untuk indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dan indikator Tingkat Kematangan UKPBJ

Yth.

1. **Sekretaris/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama di Kementerian/Lembaga**
2. **Asisten Logistik Kepolisian Republik Indonesia**
3. **Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung**
4. **Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi**
5. **Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota**

Sehubungan dengan pelaksanaan proses penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) Tahun 2024 untuk indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dan indikator Tingkat Kematangan UKPBJ yang mengacu pada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Penilaian Sementara ITKP K/L/Pemda Tahun 2024 untuk indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dan indikator Tingkat Kematangan UKPBJ sampai dengan tanggal 27 September 2024 sebagaimana terlampir dalam surat ini. Adapun hasil penilaian ITKP sementara Tahun 2024 untuk seluruh indikator dapat dipantau secara berkala melalui: <https://siukpbj.lkpp.go.id/itkp>.
2. Dalam rangka proses penilaian ITKP untuk indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dan indikator Tingkat Kematangan UKPBJ, batas waktu penyampaian bukti dukung kedua indikator tersebut kepada Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP **paling lambat diterima pada tanggal 29 Oktober 2024**.
3. Mengacu pada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021, hasil penilaian ITKP seluruh K/L/Pemda Tahun 2024 akan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan November Tahun 2024 berdasarkan data aktual yang ditarik pada tanggal 31 Oktober 2024.
4. Berdasarkan poin-poin di atas, diharapkan seluruh UKPBJ K/L/Pemda dapat memanfaatkan sisa waktu sampai batas waktu penyampaian untuk dapat meningkatkan nilai ITKP Minimal Baik khususnya pada indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dan indikator Tingkat Kematangan UKPBJ.



5. Untuk indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ yang diukur melalui persentase pemenuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ), pemutakhiran data disampaikan melalui *email* dit.bangprof@lkpp.go.id, yang meliputi:
- Salinan SK Pengangkatan JF PPBJ dari seluruh mekanisme pengangkatan;
 - Salinan SK Pemberhentian dari JF PPBJ bagi Pengelola PBJ yang diberhentikan dengan alasan:
 - Mengundurkan diri dari JF PPBJ;
 - Diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - Menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - Ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
 - Tidak memenuhi persyaratan JF PPBJ.
 - Salinan SK JF PPBJ yang pensiun;
 - Salinan SK atau surat keterangan JF PPBJ yang pindah ke/dari instansi lain; dan/atau
 - Data JF PPBJ yang meninggal dunia.
6. Untuk indikator Tingkat Kematangan UKPBJ yang diukur melalui pemenuhan atribut dari 9 variabel Kematangan UKPBJ, proses penyampaian dan verifikasi pemenuhan dilakukan melalui Aplikasi SIMKU pada laman <https://siukpbj.lkpp.go.id/>. Kelengkapan atribut mengacu pada Surat Edaran Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Contoh Bukti Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Level Proaktif. Progres penyampaian dan verifikasi pemenuhan atribut yang menghasilkan Tingkat Kematangan UKPBJ, dapat dipantau langsung pada laman tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut dapat berkoordinasi dengan narahubung kami, Sdri. Dita Prima Tri Hapsari (WA. 0813-2874-4337, untuk indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ) dan Sdr. Mahfuzan Zakaria (WA. 0812-8417-6214, untuk indikator Tingkat Kematangan UKPBJ).

Demikian kami sampaikan, atas dukungan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Hermawan

Tembusan :

1. Sekretaris Utama LKPP
2. Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP
3. Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : dTbHV0
Nomor Tiket : SK202410050001

Penilaian Sementara Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Sementara Tahun 2024
Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dan Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ

No	Nama K/L/PD	Persentase Keterangan Formasi	Tingkat Kematangan UKPBJ	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ		Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ		Tota Nilai
				Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 4 x 7	7 = 6 + 8
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	42,86%	8/9	30%	12,86	40%	35,56	48,42
2	Dewan Perwakilan Rakyat	33,33%	9/9	30%	10,00	40%	40	50,00
3	Dewan Perwakilan Daerah	133,33%	7/9	30%	30,00	40%	31,11	61,11
4	Badan Pemeriksa Keuangan	60,00%	8/9	30%	18,00	40%	35,56	53,56
5	Mahkamah Agung	8,97%	0/9	30%	2,69	40%	0	2,69
6	Mahkamah Konstitusi	60,00%	9/9	30%	18,00	40%	40	58,00
7	Komisi Yudisial	66,67%	0/9	30%	20,00	40%	0	20,00
8	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	10,00%	6/9	30%	3,00	40%	26,67	29,67
9	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	42,86%	8/9	30%	12,86	40%	35,56	48,42
10	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	60,00%	9/9	30%	18,00	40%	40	58,00
11	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	20,00%	8/9	30%	6,00	40%	35,56	41,56
12	Kementerian Sekretariat Negara	32,86%	7/9	30%	9,86	40%	31,11	40,97
13	Kementerian Dalam Negeri	93,75%	9/9	30%	28,13	40%	40	68,13
14	Kementerian Luar Negeri	26,67%	8/9	30%	8,00	40%	35,56	43,56
15	Kementerian Pertahanan	38,24%	6/9	30%	11,47	40%	26,67	38,14
16	Kementerian Agama	59,30%	8/9	30%	17,79	40%	35,56	53,35
17	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	102,40%	9/9	30%	30,00	40%	40	70,00
18	Kementerian Keuangan	78,26%	9/9	30%	23,48	40%	40	63,48
19	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	56,17%	9/9	30%	16,85	40%	40	56,85
20	Kementerian Kesehatan	55,61%	9/9	30%	16,68	40%	40	56,68
21	Kementerian Sosial	56,67%	7/9	30%	17,00	40%	31,11	48,11
22	Kementerian Ketenagakerjaan	42,86%	9/9	30%	12,86	40%	40	52,86
23	Kementerian Perindustrian	59,21%	9/9	30%	17,76	40%	40	57,76
24	Kementerian Perdagangan	100,00%	9/9	30%	30,00	40%	40	70,00
25	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	53,01%	9/9	30%	15,90	40%	40	55,90
26	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	78,60%	9/9	30%	23,58	40%	40	63,58
27	Kementerian Perhubungan	55,83%	9/9	30%	16,75	40%	40	56,75
28	Kementerian Komunikasi dan Informatika	75,76%	8/9	30%	22,73	40%	35,56	58,29
29	Kementerian Pertanian	32,50%	9/9	30%	9,75	40%	40	49,75
30	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	108,27%	5/9	30%	30,00	40%	22,22	52,22
31	Kementerian Kelautan dan Perikanan	69,14%	9/9	30%	20,74	40%	40	60,74
32	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	72,50%	9/9	30%	21,75	40%	40	61,75
33	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	28,09%	8/9	30%	8,43	40%	35,56	43,99
34	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	62,50%	8/9	30%	18,75	40%	35,56	54,31
35	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	60,00%	8/9	30%	18,00	40%	35,56	53,56
36	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	100,00%	8/9	30%	30,00	40%	35,56	65,56
37	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	77,27%	9/9	30%	23,18	40%	40	63,18
38	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	36,00%	8/9	30%	10,80	40%	35,56	46,36
39	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	45,45%	8/9	30%	13,64	40%	35,56	49,20
40	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	15,38%	3/9	30%	4,61	40%	13,33	17,94
41	Kementerian Pemuda dan Olahraga	33,33%	4/9	30%	10,00	40%	17,78	27,78
42	Sekretariat Kabinet	41,67%	6/9	30%	12,50	40%	26,67	39,17
43	Kejaksaan Agung	111,59%	6/9	30%	30,00	40%	26,67	56,67
44	Kepolisian Negara Republik Indonesia	0,00%	8/9	30%	0,00	40%	35,56	35,56
45	Arsip Nasional Republik Indonesia	92,86%	7/9	30%	27,86	40%	31,11	58,97
46	Badan Informasi Geospasial	75,00%	8/9	30%	22,50	40%	35,56	58,06
47	Badan Intelijen Negara	115,38%	9/9	30%	30,00	40%	40	70,00
48	Badan Keamanan Laut	33,33%	6/9	30%	10,00	40%	26,67	36,67
49	Badan Kepegawaian Negara	81,48%	9/9	30%	24,44	40%	40	64,44

Penilaian Sementara Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Sementara Tahun 2024
Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dan Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ

No	Nama K/L/PD	Persentase Keterisian Formasi	Tingkat Kematangan UKPBJ	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ		Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ		Tota Nilai
				Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 4 x 7	7 = 6 + 8
50	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	20,27%	9/9	30%	6,08	40%	40	46,08
51	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	23,64%	9/9	30%	7,09	40%	40	47,09
52	Badan Narkotika Nasional	25,00%	9/9	30%	7,50	40%	40	47,50
53	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	36,36%	0/9	30%	10,91	40%	0	10,91
54	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	20,00%	0/9	30%	6,00	40%	0	6,00
55	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	22,50%	5/9	30%	6,75	40%	22,22	28,97
56	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	0,00%	0/9	30%	0,00	40%	0	0,00
57	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	30,00%	4/9	30%	9,00	40%	17,78	26,78
58	Badan Pengawas Obat dan Makanan	67,16%	9/9	30%	20,15	40%	40	60,15
59	Badan Pengawas Pemilihan Umum	215,38%	8/9	30%	30,00	40%	35,56	65,56
60	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	18,18%	1/9	30%	5,45	40%	4,44	9,89
61	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	120,00%	9/9	30%	30,00	40%	40	70,00
62	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	0,00%	0/9	30%	0,00	40%	0	0
63	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	0,00%	0/9	30%	0,00	40%	0	0
64	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	31,25%	1/9	30%	9,38	40%	4,44	13,82
65	Badan Pusat Statistik	92,36%	8/9	30%	27,71	40%	35,56	63,27
66	Badan Riset dan Inovasi Nasional	84,21%	9/9	30%	25,26	40%	40	65,26
67	Badan Siber dan Sandi Negara	64,29%	9/9	30%	19,29	40%	40	59,29
68	Badan Standardisasi Nasional	70,00%	5/9	30%	21,00	40%	22,22	43,22
69	Dewan Ketahanan Nasional	60,00%	8/9	30%	18,00	40%	35,56	53,56
70	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	100,00%	0/9	30%	30,00	40%	0	30,00
71	Komisi Pemberantasan Korupsi	24,14%	8/9	30%	7,24	40%	35,56	42,80
72	Komisi Pemilihan Umum	24,68%	1/9	30%	7,40	40%	4,44	11,84
73	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	0,00%	0/9	30%	0,00	40%	0	0,00
74	Lembaga Administrasi Negara	75,00%	3/9	30%	22,50	40%	13,33	35,83
75	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	69,77%	9/9	30%	20,93	40%	40	60,93
76	Lembaga Ketahanan Nasional	83,33%	8/9	30%	25,00	40%	35,56	60,56
77	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	35,85%	3/9	30%	10,76	40%	13,33	24,09
78	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	10,00%	0/9	30%	3,00	40%	0	3,00
79	Ombudsman Republik Indonesia	60,00%	8/9	30%	18,00	40%	35,56	53,56
80	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	38,10%	1/9	30%	11,43	40%	4,44	15,87
81	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	58,82%	8/9	30%	17,65	40%	35,56	53,21
82	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	56,25%	4/9	30%	16,88	40%	17,78	34,66
83	Provinsi Aceh	70,67%	9/9	30%	21,20	40%	40	61,20
84	Kota Langsa	82,35%	4/9	30%	24,71	40%	17,78	42,49
85	Kota Banda Aceh	17,39%	6/9	30%	5,22	40%	26,67	31,89
86	Kota Subulussalam	0,00%	9/9	30%	0,00	40%	40	40,00
87	Kota Lhokseumawe	11,11%	2/9	30%	3,33	40%	8,89	12,22
88	Kota Sabang	35,29%	8/9	30%	10,59	40%	35,56	46,15
89	Kabupaten Bireuen	8,70%	4/9	30%	2,61	40%	17,78	20,39
90	Kabupaten Nagan Raya	35,29%	4/9	30%	10,59	40%	17,78	28,37
91	Kabupaten Pidie	52,38%	6/9	30%	15,71	40%	26,67	42,38
92	Kabupaten Pidie Jaya	29,41%	4/9	30%	8,82	40%	17,78	26,60
93	Kabupaten Simeulue	15,38%	6/9	30%	4,61	40%	26,67	31,28
94	Kabupaten Aceh Barat Daya	31,82%	8/9	30%	9,55	40%	35,56	45,11
95	Kabupaten Aceh Singkil	25,00%	5/9	30%	7,50	40%	22,22	29,72
96	Kabupaten Aceh Tamiang	62,50%	9/9	30%	18,75	40%	40	58,75
97	Kabupaten Gayo Lues	12,50%	4/9	30%	3,75	40%	17,78	21,53
98	Kabupaten Bener Meriah	52,94%	9/9	30%	15,88	40%	40	55,88

Penilaian Sementara Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Sementara Tahun 2024
Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dan Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ

No	Nama K/L/PD	Persentase Keterisian Formasi	Tingkat Kematangan UKPBJ	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ		Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ		Tota Nilai
				Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 4 x 7	7 = 6 + 8
99	Kabupaten Aceh Selatan	6,67%	9/9	30%	2,00	40%	40	42,00
100	Kabupaten Aceh Tenggara	30,43%	1/9	30%	9,13	40%	4,44	13,57
101	Kabupaten Aceh Timur	4,76%	4/9	30%	1,43	40%	17,78	19,21
102	Kabupaten Aceh Utara	48,15%	7/9	30%	14,45	40%	31,11	45,56
103	Kabupaten Aceh Barat	10,71%	7/9	30%	3,21	40%	31,11	34,32
104	Kabupaten Aceh Tengah	22,73%	9/9	30%	6,82	40%	40	46,82
105	Kabupaten Aceh Besar	43,75%	7/9	30%	13,13	40%	31,11	44,24
106	Kabupaten Aceh Jaya	56,25%	8/9	30%	16,88	40%	35,56	52,44
107	Provinsi Sumatera Utara	61,90%	9/9	30%	18,57	40%	40	58,57
108	Kota Tanjung Balai	36,36%	8/9	30%	10,91	40%	35,56	46,47
109	Kota Medan	37,50%	7/9	30%	11,25	40%	31,11	42,36
110	Kota Padang Sidempuan	81,82%	2/9	30%	24,55	40%	8,89	33,44
111	Kota Pematang Siantar	48,00%	9/9	30%	14,40	40%	40	54,40
112	Kota Tebing Tinggi	31,58%	8/9	30%	9,47	40%	35,56	45,03
113	Kota Binjai	30,00%	8/9	30%	9,00	40%	35,56	44,56
114	Kota Gunungsitoli	20,69%	8/9	30%	6,21	40%	35,56	41,77
115	Kota Sibolga	53,85%	3/9	30%	16,16	40%	13,33	29,49
116	Kabupaten Labuhanbatu	38,46%	9/9	30%	11,54	40%	40	51,54
117	Kabupaten Tapanuli Utara	14,29%	5/9	30%	4,29	40%	22,22	26,51
118	Kabupaten Asahan	56,52%	9/9	30%	16,96	40%	40	56,96
119	Kabupaten Batubara	73,33%	9/9	30%	22,00	40%	40	62,00
120	Kabupaten Dairi	33,33%	3/9	30%	10,00	40%	13,33	23,33
121	Kabupaten Deli Serdang	33,33%	8/9	30%	10,00	40%	35,56	45,56
122	Kabupaten Humbang Hasundutan	29,63%	5/9	30%	8,89	40%	22,22	31,11
123	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	26,67%	3/9	30%	8,00	40%	13,33	21,33
124	Kabupaten Mandailing Natal	53,33%	6/9	30%	16,00	40%	26,67	42,67
125	Kabupaten Nias Selatan	8,33%	7/9	30%	2,50	40%	31,11	33,61
126	Kabupaten Padang Lawas	13,33%	6/9	30%	4,00	40%	26,67	30,67
127	Kabupaten Pakpak Bharat	37,50%	4/9	30%	11,25	40%	17,78	29,03
128	Kabupaten Samosir	29,41%	7/9	30%	8,82	40%	31,11	39,93
129	Kabupaten Serdang Bedagai	39,13%	9/9	30%	11,74	40%	40	51,74
130	Kabupaten Langkat	30,43%	6/9	30%	9,13	40%	26,67	35,80
131	Kabupaten Toba Samosir	18,18%	3/9	30%	5,45	40%	13,33	18,78
132	Kabupaten Karo	0,00%	5/9	30%	0,00	40%	22,22	22,22
133	Kabupaten Simalungun	9,09%	4/9	30%	2,73	40%	17,78	20,51
134	Kabupaten Nias Barat	0,00%	0/9	30%	0,00	40%	0	0,00
135	Kabupaten Tapanuli Tengah	41,67%	4/9	30%	12,50	40%	17,78	30,28
136	Kabupaten Labuhanbatu Utara	52,94%	7/9	30%	15,88	40%	31,11	46,99
137	Kabupaten Nias	41,67%	9/9	30%	12,50	40%	40	52,50
138	Kabupaten Nias Utara	0,00%	4/9	30%	0,00	40%	17,78	17,78
139	Kabupaten Tapanuli Selatan	0,00%	2/9	30%	0,00	40%	8,89	8,89
140	Kabupaten Padang Lawas Utara	0,00%	3/9	30%	0,00	40%	13,33	13,33
141	Provinsi Sumatera Barat	89,58%	9/9	30%	26,87	40%	40	66,87
142	Kota Sawahlunto	69,23%	9/9	30%	20,77	40%	40	60,77
143	Kota Padang Panjang	100,00%	9/9	30%	30,00	40%	40	70,00
144	Kota Payakumbuh	76,47%	9/9	30%	22,94	40%	40	62,94
145	Kota Padang	47,06%	9/9	30%	14,12	40%	40	54,12
146	Kota Solok	54,55%	9/9	30%	16,37	40%	40	56,37
147	Kota Bukittinggi	40,91%	8/9	30%	12,27	40%	35,56	47,83

Penilaian Sementara Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Sementara Tahun 2024
Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dan Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ

No	Nama K/L/PD	Persentase Keterisian Formasi	Tingkat Kematangan UKPBJ	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ		Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ		Tota Nilai
				Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 4 x 7	7 = 6 + 8
148	Kota Pariaman	36,36%	8/9	30%	10,91	40%	35,56	46,47
149	Kabupaten Sijunjung	36,84%	7/9	30%	11,05	40%	31,11	42,16
150	Kabupaten Pesisir Selatan	55,00%	9/9	30%	16,50	40%	40	56,50
151	Kabupaten Tanah Datar	61,11%	9/9	30%	18,33	40%	40	58,33
152	Kabupaten Dharmasraya	45,00%	9/9	30%	13,50	40%	40	53,50
153	Kabupaten Pasaman	90,00%	9/9	30%	27,00	40%	40	67,00
154	Kabupaten Agam	56,52%	9/9	30%	16,96	40%	40	56,96
155	Kabupaten Padang Pariaman	47,62%	8/9	30%	14,29	40%	35,56	49,85
156	Kabupaten Solok	31,82%	9/9	30%	9,55	40%	40	49,55
157	Kabupaten Lima Puluh Kota	72,00%	9/9	30%	21,60	40%	40	61,60
158	Kabupaten Pasaman Barat	26,32%	3/9	30%	7,90	40%	13,33	21,23
159	Kabupaten Solok Selatan	33,33%	8/9	30%	10,00	40%	35,56	45,56
160	Kabupaten Kepulauan Mentawai	33,33%	9/9	30%	10,00	40%	40	50,00
161	Provinsi Riau	53,85%	9/9	30%	16,16	40%	40	56,16
162	Kota Pekanbaru	76,00%	8/9	30%	22,80	40%	35,56	58,36
163	Kota Dumai	50,00%	8/9	30%	15,00	40%	35,56	50,56
164	Kabupaten Kuantan Singingi	36,84%	5/9	30%	11,05	40%	22,22	33,27
165	Kabupaten Indragiri Hilir	25,93%	9/9	30%	7,78	40%	40	47,78
166	Kabupaten Kampar	31,25%	7/9	30%	9,38	40%	31,11	40,49
167	Kabupaten Bengkalis	43,33%	5/9	30%	13,00	40%	22,22	35,22
168	Kabupaten Pelalawan	3,57%	8/9	30%	1,07	40%	35,56	36,63
169	Kabupaten Rokan Hulu	75,00%	3/9	30%	22,50	40%	13,33	35,83
170	Kabupaten Siak	87,88%	8/9	30%	26,36	40%	35,56	61,92
171	Kabupaten Kepulauan Meranti	23,08%	9/9	30%	6,92	40%	40	46,92
172	Kabupaten Rokan Hilir	23,33%	8/9	30%	7,00	40%	35,56	42,56
173	Kabupaten Indragiri Hulu	22,73%	8/9	30%	6,82	40%	35,56	42,38
174	Provinsi Jambi	31,71%	9/9	30%	9,51	40%	40	49,51
175	Kota Jambi	32,00%	9/9	30%	9,60	40%	40	49,60
176	Kota Sungai Penuh	27,27%	4/9	30%	8,18	40%	17,78	25,96
177	Kabupaten Sarolangun	25,93%	9/9	30%	7,78	40%	40	47,78
178	Kabupaten Batanghari	18,18%	9/9	30%	5,45	40%	40	45,45
179	Kabupaten Kerinci	33,33%	9/9	30%	10,00	40%	40	50,00
180	Kabupaten Muaro Jambi	41,18%	5/9	30%	12,35	40%	22,22	34,57
181	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	11,43%	6/9	30%	3,43	40%	26,67	30,10
182	Kabupaten Merangin	12,90%	9/9	30%	3,87	40%	40	43,87
183	Kabupaten Tebo	21,74%	7/9	30%	6,52	40%	31,11	37,63
184	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	41,38%	9/9	30%	12,41	40%	40	52,41
185	Kabupaten Bungo	19,23%	8/9	30%	5,77	40%	35,56	41,33
186	Provinsi Sumatera Selatan	43,55%	9/9	30%	13,07	40%	40	53,07
187	Kota Pagar Alam	29,41%	9/9	30%	8,82	40%	40	48,82
188	Kota Palembang	41,46%	9/9	30%	12,44	40%	40	52,44
189	Kota Prabumulih	88,89%	9/9	30%	26,67	40%	40	66,67
190	Kota Lubuklinggau	27,27%	9/9	30%	8,18	40%	40	48,18
191	Kabupaten Bogor	79,63%	9/9	30%	23,89	40%	40	63,89
192	Kabupaten Banyuasin	30,00%	9/9	30%	9,00	40%	40	49,00
193	Kabupaten Muara Enim	20,59%	6/9	30%	6,18	40%	26,67	32,85
194	Kabupaten Musi Banyuasin	43,24%	9/9	30%	12,97	40%	40	52,97
195	Kabupaten Ogan Komering Ilir	26,92%	9/9	30%	8,08	40%	40	48,08
196	Kabupaten Empat Lawang	0,00%	3/9	30%	0,00	40%	13,33	13,33

Penilaian Sementara Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Sementara Tahun 2024
Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dan Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ

No	Nama K/L/PD	Persentase Keterisian Formasi	Tingkat Kematangan UKPBJ	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ		Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ		Tota Nilai
				Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 4 x 7	7 = 6 + 8
197	Kabupaten Musi Rawas	39,13%	5/9	30%	11,74	40%	22,22	33,96
198	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	15,38%	8/9	30%	4,61	40%	35,56	40,17
199	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	16,13%	8/9	30%	4,84	40%	35,56	40,40
200	Kabupaten Ogan Komering Ulu	71,43%	9/9	30%	21,43	40%	40	61,43
201	Kabupaten Ogan Ilir	37,50%	9/9	30%	11,25	40%	40	51,25
202	Kabupaten Lahat	44,44%	4/9	30%	13,33	40%	17,78	31,11
203	Kabupaten Musi Rawas Utara	25,81%	6/9	30%	7,74	40%	26,67	34,41
204	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	36,00%	9/9	30%	10,80	40%	40	50,80
205	Provinsi Bengkulu	62,79%	9/9	30%	18,84	40%	40	58,84
206	Kota Bengkulu	52,63%	8/9	30%	15,79	40%	35,56	51,35
207	Kabupaten Bengkulu Utara	76,92%	5/9	30%	23,08	40%	22,22	45,30
208	Kabupaten Lebong	15,79%	6/9	30%	4,74	40%	26,67	31,41
209	Kabupaten Bengkulu Selatan	40,91%	8/9	30%	12,27	40%	35,56	47,83
210	Kabupaten Muko-Muko	42,86%	6/9	30%	12,86	40%	26,67	39,53
211	Kabupaten Kepahiang	10,00%	6/9	30%	3,00	40%	26,67	29,67
212	Kabupaten Rejang Lebong	10,00%	8/9	30%	3,00	40%	35,56	38,56
213	Kabupaten Bengkulu Tengah	73,33%	8/9	30%	22,00	40%	35,56	57,56
214	Kabupaten Kaur	5,00%	4/9	30%	1,50	40%	17,78	19,28
215	Kabupaten Seluma	35,71%	8/9	30%	10,71	40%	35,56	46,27
216	Provinsi Lampung	57,50%	9/9	30%	17,25	40%	40	57,25
217	Kota Metro	53,33%	9/9	30%	16,00	40%	40	56,00
218	Kota Bandar Lampung	21,05%	9/9	30%	6,32	40%	40	46,32
219	Kabupaten Pesawaran	63,16%	2/9	30%	18,95	40%	8,89	27,84
220	Kabupaten Lampung Selatan	65,00%	9/9	30%	19,50	40%	40	59,50
221	Kabupaten Lampung Timur	36,00%	5/9	30%	10,80	40%	22,22	33,02
222	Kabupaten Lampung Barat	48,15%	8/9	30%	14,45	40%	35,56	50,01
223	Kabupaten Lampung Utara	47,37%	7/9	30%	14,21	40%	31,11	45,32
224	Kabupaten Way Kanan	36,00%	7/9	30%	10,80	40%	31,11	41,91
225	Kabupaten Lampung Tengah	89,66%	9/9	30%	26,90	40%	40	66,90
226	Kabupaten Tulang Bawang Barat	38,10%	8/9	30%	11,43	40%	35,56	46,99
227	Kabupaten Tulang Bawang	41,67%	8/9	30%	12,50	40%	35,56	48,06
228	Kabupaten Mesuji	69,57%	9/9	30%	20,87	40%	40	60,87
229	Kabupaten Tanggamus	16,67%	6/9	30%	5,00	40%	26,67	31,67
230	Kabupaten Pringsewu	54,55%	8/9	30%	16,37	40%	35,56	51,93
231	Kabupaten Pesisir Barat	14,29%	2/9	30%	4,29	40%	8,89	13,18
232	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	55,56%	9/9	30%	16,67	40%	40	56,67
233	Kota Pangkal Pinang	87,50%	9/9	30%	26,25	40%	40	66,25
234	Kabupaten Bangka	70,00%	9/9	30%	21,00	40%	40	61,00
235	Kabupaten Bangka Tengah	57,14%	9/9	30%	17,14	40%	40	57,14
236	Kabupaten Bangka Selatan	10,00%	4/9	30%	3,00	40%	17,78	20,78
237	Kabupaten Belitung	29,41%	9/9	30%	8,82	40%	40	48,82
238	Kabupaten Belitung Timur	70,83%	9/9	30%	21,25	40%	40	61,25
239	Kabupaten Bangka Barat	85,71%	9/9	30%	25,71	40%	40	65,71
240	Provinsi Kepulauan Riau	84,78%	9/9	30%	25,43	40%	40	65,43
241	Kota Batam	67,50%	9/9	30%	20,25	40%	40	60,25
242	Kota Tanjung Pinang	45,83%	9/9	30%	13,75	40%	40	53,75
243	Kabupaten Karimun	53,57%	9/9	30%	16,07	40%	40	56,07
244	Kabupaten Natuna	51,72%	9/9	30%	15,52	40%	40	55,52
245	Kabupaten Lingga	46,15%	9/9	30%	13,85	40%	40	53,85

Penilaian Sementara Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Sementara Tahun 2024
Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dan Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ

No	Nama K/L/PD	Persentase Keterisian Formasi	Tingkat Kematangan UKPBJ	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ		Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ		Tota Nilai
				Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 4 x 7	7 = 6 + 8
246	Kabupaten Bintan	30,43%	9/9	30%	9,13	40%	40	49,13
247	Kabupaten Kepulauan Anambas	63,33%	9/9	30%	19,00	40%	40	59,00
248	Provinsi DKI Jakarta	60,69%	9/9	30%	18,21	40%	40	58,21
249	Provinsi Jawa Barat	71,64%	9/9	30%	21,49	40%	40	61,49
250	Kota Bogor	28,21%	9/9	30%	8,46	40%	40	48,46
251	Kota Sukabumi	35,00%	9/9	30%	10,50	40%	40	50,50
252	Kota Cimahi	25,93%	9/9	30%	7,78	40%	40	47,78
253	Kota Cirebon	59,46%	9/9	30%	17,84	40%	40	57,84
254	Kota Tasikmalaya	25,81%	9/9	30%	7,74	40%	40	47,74
255	Kota Bekasi	71,43%	9/9	30%	21,43	40%	40	61,43
256	Kota Banjar	66,67%	9/9	30%	20,00	40%	40	60,00
257	Kota Depok	82,50%	9/9	30%	24,75	40%	40	64,75
258	Kota Bandung	62,79%	9/9	30%	18,84	40%	40	58,84
259	Kabupaten Majalengka	25,64%	9/9	30%	7,69	40%	40	47,69
260	Kabupaten Bandung Barat	77,78%	9/9	30%	23,33	40%	40	63,33
261	Kabupaten Cirebon	25,00%	9/9	30%	7,50	40%	40	47,50
262	Kabupaten Garut	66,67%	9/9	30%	20,00	40%	40	60,00
263	Kabupaten Kuningan	69,23%	9/9	30%	20,77	40%	40	60,77
264	Kabupaten Bandung	50,00%	9/9	30%	15,00	40%	40	55,00
265	Kabupaten Purwakarta	55,56%	9/9	30%	16,67	40%	40	56,67
266	Kabupaten Tasikmalaya	25,00%	9/9	30%	7,50	40%	40	47,50
267	Kabupaten Bekasi	60,00%	9/9	30%	18,00	40%	40	58,00
268	Kabupaten Ciamis	45,00%	9/9	30%	13,50	40%	40	53,50
269	Kabupaten Cianjur	22,22%	9/9	30%	6,67	40%	40	46,67
270	Kabupaten Sumedang	28,57%	9/9	30%	8,57	40%	40	48,57
271	Kabupaten Subang	60,61%	9/9	30%	18,18	40%	40	58,18
272	Kabupaten Sukabumi	65,79%	9/9	30%	19,74	40%	40	59,74
273	Kabupaten Pangandaran	70,00%	9/9	30%	21,00	40%	40	61,00
274	Kabupaten Indramayu	34,78%	9/9	30%	10,43	40%	40	50,43
275	Kabupaten Karawang	45,45%	9/9	30%	13,64	40%	40	53,64
276	Provinsi Jawa Tengah	74,65%	9/9	30%	22,40	40%	40	62,40
277	Kota Tegal	36,84%	8/9	30%	11,05	40%	35,56	46,61
278	Kota Semarang	47,06%	9/9	30%	14,12	40%	40	54,12
279	Kota Pekalongan	66,67%	8/9	30%	20,00	40%	35,56	55,56
280	Kota Surakarta	27,03%	9/9	30%	8,11	40%	40	48,11
281	Kota Salatiga	42,11%	9/9	30%	12,63	40%	40	52,63
282	Kota Magelang	66,67%	9/9	30%	20,00	40%	40	60,00
283	Kabupaten Brebes	80,00%	9/9	30%	24,00	40%	40	64,00
284	Kabupaten Banyumas	24,24%	8/9	30%	7,27	40%	35,56	42,83
285	Kabupaten Karanganyar	39,29%	8/9	30%	11,79	40%	35,56	47,35
286	Kabupaten Blora	83,33%	9/9	30%	25,00	40%	40	65,00
287	Kabupaten Kebumen	58,06%	9/9	30%	17,42	40%	40	57,42
288	Kabupaten Purworejo	44,00%	8/9	30%	13,20	40%	35,56	48,76
289	Kabupaten Banjarnegara	50,00%	8/9	30%	15,00	40%	35,56	50,56
290	Kabupaten Pekalongan	51,72%	8/9	30%	15,52	40%	35,56	51,08
291	Kabupaten Pematang	43,75%	8/9	30%	13,13	40%	35,56	48,69
292	Kabupaten Jepara	63,33%	8/9	30%	19,00	40%	35,56	54,56
293	Kabupaten Cilacap	41,03%	8/9	30%	12,31	40%	35,56	47,87
294	Kabupaten Batang	52,17%	9/9	30%	15,65	40%	40	55,65

Penilaian Sementara Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Sementara Tahun 2024
Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dan Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ

No	Nama K/L/PD	Persentase Keterisian Formasi	Tingkat Kematangan UKPBJ	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ		Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ		Tota Nilai
				Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 4 x 7	7 = 6 + 8
295	Kabupaten Boyolali	55,00%	8/9	30%	16,50	40%	35,56	52,06
296	Kabupaten Semarang	60,00%	9/9	30%	18,00	40%	40	58,00
297	Kabupaten Sragen	64,00%	9/9	30%	19,20	40%	40	59,20
298	Kabupaten Temanggung	56,00%	9/9	30%	16,80	40%	40	56,80
299	Kabupaten Klaten	14,81%	8/9	30%	4,44	40%	35,56	40,00
300	Kabupaten Tegal	56,41%	9/9	30%	16,92	40%	40	56,92
301	Kabupaten Grobogan	44,12%	8/9	30%	13,24	40%	35,56	48,80
302	Kabupaten Kudus	75,00%	9/9	30%	22,50	40%	40	62,50
303	Kabupaten Magelang	70,37%	9/9	30%	21,11	40%	40	61,11
304	Kabupaten Purbalingga	29,63%	8/9	30%	8,89	40%	35,56	44,45
305	Kabupaten Sukoharjo	50,00%	9/9	30%	15,00	40%	40	55,00
306	Kabupaten Wonosobo	72,00%	8/9	30%	21,60	40%	35,56	57,16
307	Kabupaten Wonogiri	38,71%	8/9	30%	11,61	40%	35,56	47,17
308	Kabupaten Demak	46,15%	8/9	30%	13,85	40%	35,56	49,41
309	Kabupaten Kendal	76,47%	9/9	30%	22,94	40%	40	62,94
310	Kabupaten Pati	58,33%	9/9	30%	17,50	40%	40	57,50
311	Kabupaten Rembang	54,17%	8/9	30%	16,25	40%	35,56	51,81
312	Provinsi D. I. Yogyakarta	64,44%	9/9	30%	19,33	40%	40	59,33
313	Kota Yogyakarta	77,78%	9/9	30%	23,33	40%	40	63,33
314	Kabupaten Gunung Kidul	40,63%	8/9	30%	12,19	40%	35,56	47,75
315	Kabupaten Kulon Progo	62,50%	8/9	30%	18,75	40%	35,56	54,31
316	Kabupaten Sleman	46,94%	9/9	30%	14,08	40%	40	54,08
317	Kabupaten Bantul	65,22%	8/9	30%	19,57	40%	35,56	55,13
318	Provinsi Jawa Timur	50,85%	9/9	30%	15,26	40%	40	55,26
319	Kota Batu	30,00%	8/9	30%	9,00	40%	35,56	44,56
320	Kota Blitar	50,00%	8/9	30%	15,00	40%	35,56	50,56
321	Kota Madiun	33,33%	9/9	30%	10,00	40%	40	50,00
322	Kota Malang	72,00%	9/9	30%	21,60	40%	40	61,60
323	Kota Surabaya	51,79%	9/9	30%	15,54	40%	40	55,54
324	Kota Mojokerto	43,75%	9/9	30%	13,13	40%	40	53,13
325	Kota Kediri	79,17%	8/9	30%	23,75	40%	35,56	59,31
326	Kota Probolinggo	79,31%	8/9	30%	23,79	40%	35,56	59,35
327	Kota Pasuruan	41,67%	8/9	30%	12,50	40%	35,56	48,06
328	Kabupaten Banyuwangi	66,67%	9/9	30%	20,00	40%	40	60,00
329	Kabupaten Sidoarjo	65,71%	8/9	30%	19,71	40%	35,56	55,27
330	Kabupaten Madiun	37,04%	9/9	30%	11,11	40%	40	51,11
331	Kabupaten Sumenep	18,18%	8/9	30%	5,45	40%	35,56	41,01
332	Kabupaten Pacitan	47,83%	8/9	30%	14,35	40%	35,56	49,91
333	Kabupaten Jombang	43,75%	9/9	30%	13,13	40%	40	53,13
334	Kabupaten Magetan	77,42%	9/9	30%	23,23	40%	40	63,23
335	Kabupaten Malang	47,27%	9/9	30%	14,18	40%	40	54,18
336	Kabupaten Nganjuk	44,00%	8/9	30%	13,20	40%	35,56	48,76
337	Kabupaten Gresik	45,71%	9/9	30%	13,71	40%	40	53,71
338	Kabupaten Blitar	55,17%	9/9	30%	16,55	40%	40	56,55
339	Kabupaten Mojokerto	44,12%	9/9	30%	13,24	40%	40	53,24
340	Kabupaten Bojonegoro	44,90%	9/9	30%	13,47	40%	40	53,47
341	Kabupaten Jember	22,00%	9/9	30%	6,60	40%	40	46,60
342	Kabupaten Kediri	24,39%	8/9	30%	7,32	40%	35,56	42,88
343	Kabupaten Lamongan	30,30%	7/9	30%	9,09	40%	31,11	40,20

Penilaian Sementara Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Sementara Tahun 2024
Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dan Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ

No	Nama K/L/PD	Persentase Keterisian Formasi	Tingkat Kematangan UKPBJ	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ		Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ		Tota Nilai
				Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 4 x 7	7 = 6 + 8
344	Kabupaten Ngawi	76,92%	9/9	30%	23,08	40%	40	63,08
345	Kabupaten Situbondo	40,00%	9/9	30%	12,00	40%	40	52,00
346	Kabupaten Probolinggo	51,72%	8/9	30%	15,52	40%	35,56	51,08
347	Kabupaten Lumajang	18,52%	8/9	30%	5,56	40%	35,56	41,12
348	Kabupaten Pasuruan	56,10%	9/9	30%	16,83	40%	40	56,83
349	Kabupaten Sampang	9,38%	8/9	30%	2,81	40%	35,56	38,37
350	Kabupaten Tuban	76,19%	9/9	30%	22,86	40%	40	62,86
351	Kabupaten Bondowoso	24,00%	8/9	30%	7,20	40%	35,56	42,76
352	Kabupaten Trenggalek	34,38%	8/9	30%	10,31	40%	35,56	45,87
353	Kabupaten Pamekasan	44,44%	8/9	30%	13,33	40%	35,56	48,89
354	Kabupaten Tulungagung	60,00%	8/9	30%	18,00	40%	35,56	53,56
355	Kabupaten Bangkalan	30,00%	8/9	30%	9,00	40%	35,56	44,56
356	Kabupaten Ponorogo	42,31%	8/9	30%	12,69	40%	35,56	48,25
357	Provinsi Banten	86,96%	8/9	30%	26,09	40%	35,56	61,65
358	Kota Tangerang	88,64%	9/9	30%	26,59	40%	40	66,59
359	Kota Serang	34,78%	4/9	30%	10,43	40%	17,78	28,21
360	Kota Tangerang Selatan	31,82%	9/9	30%	9,55	40%	40	49,55
361	Kota Cilegon	63,33%	4/9	30%	19,00	40%	17,78	36,78
362	Kabupaten Lebak	58,06%	9/9	30%	17,42	40%	40	57,42
363	Kabupaten Serang	65,79%	9/9	30%	19,74	40%	40	59,74
364	Kabupaten Tangerang	104,88%	9/9	30%	30,00	40%	40	70,00
365	Kabupaten Pandeglang	91,18%	9/9	30%	27,35	40%	40	67,35
366	Provinsi Bali	100,00%	9/9	30%	30,00	40%	40	70,00
367	Kota Denpasar	108,57%	9/9	30%	30,00	40%	40	70,00
368	Kabupaten Badung	60,61%	9/9	30%	18,18	40%	40	58,18
369	Kabupaten Jembrana	126,09%	9/9	30%	30,00	40%	40	70,00
370	Kabupaten Bangli	65,22%	8/9	30%	19,57	40%	35,56	55,13
371	Kabupaten Buleleng	78,13%	9/9	30%	23,44	40%	40	63,44
372	Kabupaten Gianyar	77,27%	9/9	30%	23,18	40%	40	63,18
373	Kabupaten Klungkung	89,19%	9/9	30%	26,76	40%	40	66,76
374	Kabupaten Tabanan	89,66%	9/9	30%	26,90	40%	40	66,90
375	Kabupaten Karangasem	31,82%	8/9	30%	9,55	40%	35,56	45,11
376	Provinsi Nusa Tenggara Barat	73,47%	9/9	30%	22,04	40%	40	62,04
377	Kota Mataram	35,00%	9/9	30%	10,50	40%	40	50,50
378	Kota Bima	100,00%	9/9	30%	30,00	40%	40	70,00
379	Kabupaten Sumbawa Barat	16,00%	7/9	30%	4,80	40%	31,11	35,91
380	Kabupaten Sumbawa	95,45%	9/9	30%	28,64	40%	40	68,64
381	Kabupaten Lombok Tengah	45,45%	9/9	30%	13,64	40%	40	53,64
382	Kabupaten Lombok Timur	13,79%	9/9	30%	4,14	40%	40	44,14
383	Kabupaten Lombok Barat	46,43%	9/9	30%	13,93	40%	40	53,93
384	Kabupaten Lombok Utara	31,58%	6/9	30%	9,47	40%	26,67	36,14
385	Kabupaten Bima	21,43%	5/9	30%	6,43	40%	22,22	28,65
386	Kabupaten Dompu	20,00%	8/9	30%	6,00	40%	35,56	41,56
387	Provinsi Nusa Tenggara Timur	43,33%	9/9	30%	13,00	40%	40	53,00
388	Kota Kupang	53,85%	7/9	30%	16,16	40%	31,11	47,27
389	Kabupaten Ende	11,76%	3/9	30%	3,53	40%	13,33	16,86
390	Kabupaten Sumba Barat	0,00%	3/9	30%	0,00	40%	13,33	13,33
391	Kabupaten Sumba Barat Daya	0,00%	0/9	30%	0,00	40%	0	0,00
392	Kabupaten Belu	0,00%	5/9	30%	0,00	40%	22,22	22,22

Penilaian Sementara Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Sementara Tahun 2024
Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dan Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ

No	Nama K/L/PD	Persentase Keterisian Formasi	Tingkat Kematangan UKPBJ	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ		Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ		Tota Nilai
				Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 4 x 7	7 = 6 + 8
393	Kabupaten Timor Tengah Utara	0,00%	5/9	30%	0,00	40%	22,22	22,22
394	Kabupaten Manggarai	14,29%	4/9	30%	4,29	40%	17,78	22,07
395	Kabupaten Alor	75,00%	5/9	30%	22,50	40%	22,22	44,72
396	Kabupaten Manggarai Barat	0,00%	3/9	30%	0,00	40%	13,33	13,33
397	Kabupaten Kupang	50,00%	8/9	30%	15,00	40%	35,56	50,56
398	Kabupaten Rote Ndao	29,41%	3/9	30%	8,82	40%	13,33	22,15
399	Kabupaten Timor Tengah Selatan	63,64%	8/9	30%	19,09	40%	35,56	54,65
400	Kabupaten Ngada	0,00%	3/9	30%	0,00	40%	13,33	13,33
401	Kabupaten Nagekeo	0,00%	6/9	30%	0,00	40%	26,67	26,67
402	Kabupaten Manggarai Timur	38,89%	3/9	30%	11,67	40%	13,33	25,00
403	Kabupaten Sikka	75,00%	9/9	30%	22,50	40%	40	62,50
404	Kabupaten Sumba Tengah	0,00%	2/9	30%	0,00	40%	8,89	8,89
405	Kabupaten Sumba Timur	0,00%	0/9	30%	0,00	40%	0	0,00
406	Kabupaten Flores Timur	20,00%	2/9	30%	6,00	40%	8,89	14,89
407	Kabupaten Lembata	40,00%	4/9	30%	12,00	40%	17,78	29,78
408	Kabupaten Sabu Raijua	0,00%	0/9	30%	0,00	40%	0	0,00
409	Kabupaten Malaka	80,00%	2/9	30%	24,00	40%	8,89	32,89
410	Provinsi Kalimantan Utara	108,33%	9/9	30%	30,00	40%	40	70,00
411	Kota Tarakan	70,00%	9/9	30%	21,00	40%	40	61,00
412	Kabupaten Bulungan	65,00%	8/9	30%	19,50	40%	35,56	55,06
413	Kabupaten Nunukan	30,00%	9/9	30%	9,00	40%	40	49,00
414	Kabupaten Malinau	18,75%	8/9	30%	5,63	40%	35,56	41,19
415	Kabupaten Tana Tidung	50,00%	8/9	30%	15,00	40%	35,56	50,56
416	Provinsi Kalimantan Barat	70,21%	9/9	30%	21,06	40%	40	61,06
417	Kota Pontianak	58,62%	8/9	30%	17,59	40%	35,56	53,15
418	Kota Singkawang	47,37%	9/9	30%	14,21	40%	40	54,21
419	Kabupaten Sekadau	71,43%	5/9	30%	21,43	40%	22,22	43,65
420	Kabupaten Ketapang	61,29%	8/9	30%	18,39	40%	35,56	53,95
421	Kabupaten Kubu Raya	91,67%	8/9	30%	27,50	40%	35,56	63,06
422	Kabupaten Sanggau	74,19%	9/9	30%	22,26	40%	40	62,26
423	Kabupaten Landak	65,22%	5/9	30%	19,57	40%	22,22	41,79
424	Kabupaten Bengkayang	61,54%	8/9	30%	18,46	40%	35,56	54,02
425	Kabupaten Kayong Utara	66,67%	5/9	30%	20,00	40%	22,22	42,22
426	Kabupaten Sambas	55,00%	8/9	30%	16,50	40%	35,56	52,06
427	Kabupaten Kapuas Hulu	47,37%	8/9	30%	14,21	40%	35,56	49,77
428	Kabupaten Melawi	26,67%	6/9	30%	8,00	40%	26,67	34,67
429	Kabupaten Sintang	100,00%	8/9	30%	30,00	40%	35,56	65,56
430	Kabupaten Mempawah	41,18%	7/9	30%	12,35	40%	31,11	43,46
431	Provinsi Kalimantan Tengah	57,50%	9/9	30%	17,25	40%	40	57,25
432	Kota Palangka Raya	52,38%	9/9	30%	15,71	40%	40	55,71
433	Kabupaten Kotawaringin Timur	41,38%	8/9	30%	12,41	40%	35,56	47,97
434	Kabupaten Kotawaringin Barat	54,76%	8/9	30%	16,43	40%	35,56	51,99
435	Kabupaten Lamandau	30,00%	8/9	30%	9,00	40%	35,56	44,56
436	Kabupaten Seruyan	22,50%	1/9	30%	6,75	40%	4,44	11,19
437	Kabupaten Barito Utara	23,08%	8/9	30%	6,92	40%	35,56	42,48
438	Kabupaten Barito Selatan	81,82%	9/9	30%	24,55	40%	40	64,55
439	Kabupaten Barito Timur	42,86%	7/9	30%	12,86	40%	31,11	43,97
440	Kabupaten Gunung Mas	31,25%	8/9	30%	9,38	40%	35,56	44,94
441	Kabupaten Katingan	76,47%	8/9	30%	22,94	40%	35,56	58,50

Penilaian Sementara Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Sementara Tahun 2024
Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dan Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ

No	Nama K/L/PD	Persentase Keterisian Formasi	Tingkat Kematangan UKPBJ	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ		Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ		Tota Nilai
				Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 4 x 7	7 = 6 + 8
442	Kabupaten Sukamara	37,50%	2/9	30%	11,25	40%	8,89	20,14
443	Kabupaten Pulang Pisau	22,58%	3/9	30%	6,77	40%	13,33	20,10
444	Kabupaten Kapuas	31,82%	4/9	30%	9,55	40%	17,78	27,33
445	Kabupaten Murung Raya	95,45%	8/9	30%	28,64	40%	35,56	64,20
446	Provinsi Kalimantan Selatan	103,33%	9/9	30%	30,00	40%	40	70,00
447	Kota Banjarmasin	77,27%	9/9	30%	23,18	40%	40	63,18
448	Kota Banjarbaru	69,57%	9/9	30%	20,87	40%	40	60,87
449	Kabupaten Banjar	56,00%	9/9	30%	16,80	40%	40	56,80
450	Kabupaten Balangan	30,43%	9/9	30%	9,13	40%	40	49,13
451	Kabupaten Hulu Sungai Utara	52,94%	9/9	30%	15,88	40%	40	55,88
452	Kabupaten Tanah Laut	57,69%	9/9	30%	17,31	40%	40	57,31
453	Kabupaten Tabalong	77,78%	9/9	30%	23,33	40%	40	63,33
454	Kabupaten Tapin	68,18%	8/9	30%	20,45	40%	35,56	56,01
455	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	64,00%	9/9	30%	19,20	40%	40	59,20
456	Kabupaten Tanah Bumbu	56,67%	8/9	30%	17,00	40%	35,56	52,56
457	Kabupaten Barito Kuala	69,23%	9/9	30%	20,77	40%	40	60,77
458	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	69,57%	9/9	30%	20,87	40%	40	60,87
459	Kabupaten Kotabaru	40,74%	8/9	30%	12,22	40%	35,56	47,78
460	Provinsi Kalimantan Timur	75,47%	9/9	30%	22,64	40%	40	62,64
461	Kota Samarinda	20,83%	8/9	30%	6,25	40%	35,56	41,81
462	Kota Balikpapan	34,88%	8/9	30%	10,46	40%	35,56	46,02
463	Kota Bontang	58,82%	9/9	30%	17,65	40%	40	57,65
464	Kabupaten Berau	50,00%	9/9	30%	15,00	40%	40	55,00
465	Kabupaten Penajam Paser Utara	26,09%	8/9	30%	7,83	40%	35,56	43,39
466	Kabupaten Kutai Kartanegara	32,22%	9/9	30%	9,67	40%	40	49,67
467	Kabupaten Paser	16,67%	9/9	30%	5,00	40%	40	45,00
468	Kabupaten Kutai Timur	66,67%	9/9	30%	20,00	40%	40	60,00
469	Kabupaten Kutai Barat	35,48%	8/9	30%	10,64	40%	35,56	46,20
470	Kabupaten Mahakam Ulu	2,78%	7/9	30%	0,83	40%	31,11	31,94
471	Provinsi Sulawesi Utara	41,30%	9/9	30%	12,39	40%	40	52,39
472	Kota Kotamobagu	190,00%	8/9	30%	30,00	40%	35,56	65,56
473	Kota Tomohon	20,00%	8/9	30%	6,00	40%	35,56	41,56
474	Kota Manado	8,70%	8/9	30%	2,61	40%	35,56	38,17
475	Kota Bitung	13,64%	8/9	30%	4,09	40%	35,56	39,65
476	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	9,09%	8/9	30%	2,73	40%	35,56	38,29
477	Kabupaten Minahasa Utara	91,67%	9/9	30%	27,50	40%	40	67,50
478	Kabupaten Minahasa Tenggara	45,45%	8/9	30%	13,64	40%	35,56	49,20
479	Kabupaten Bolaang Mongondow	15,00%	8/9	30%	4,50	40%	35,56	40,06
480	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	54,55%	8/9	30%	16,37	40%	35,56	51,93
481	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	60,00%	9/9	30%	18,00	40%	40	58,00
482	Kabupaten Kepulauan Talaud	0,00%	6/9	30%	0,00	40%	26,67	26,67
483	Kabupaten Kepulauan Sangihe	45,83%	8/9	30%	13,75	40%	35,56	49,31
484	Kabupaten Minahasa Selatan	30,77%	8/9	30%	9,23	40%	35,56	44,79
485	Kabupaten Minahasa	45,45%	8/9	30%	13,64	40%	35,56	49,20
486	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	30,00%	8/9	30%	9,00	40%	35,56	44,56
487	Provinsi Sulawesi Tengah	57,78%	9/9	30%	17,33	40%	40	57,33
488	Kota Palu	60,00%	9/9	30%	18,00	40%	40	58,00
489	Kabupaten Donggala	11,76%	8/9	30%	3,53	40%	35,56	39,09
490	Kabupaten Parigi Moutong	14,29%	8/9	30%	4,29	40%	35,56	39,85

Penilaian Sementara Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Sementara Tahun 2024
Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dan Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ

No	Nama K/L/PD	Persentase Keterisian Formasi	Tingkat Kematangan UKPBJ	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ		Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ		Tota Nilai
				Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 4 x 7	7 = 6 + 8
491	Kabupaten Tojo Una-Una	40,00%	9/9	30%	12,00	40%	40	52,00
492	Kabupaten Morowali	8,00%	9/9	30%	2,40	40%	40	42,40
493	Kabupaten Banggai	43,48%	9/9	30%	13,04	40%	40	53,04
494	Kabupaten Poso	25,00%	9/9	30%	7,50	40%	40	47,50
495	Kabupaten Buol	75,00%	8/9	30%	22,50	40%	35,56	58,06
496	Kabupaten Toli-Toli	38,89%	9/9	30%	11,67	40%	40	51,67
497	Kabupaten Sigi	83,33%	6/9	30%	25,00	40%	26,67	51,67
498	Kabupaten Banggai Kepulauan	0,00%	4/9	30%	0,00	40%	17,78	17,78
499	Kabupaten Morowali Utara	66,67%	8/9	30%	20,00	40%	35,56	55,56
500	Kabupaten Banggai Laut	90,00%	8/9	30%	27,00	40%	35,56	62,56
501	Provinsi Sulawesi Selatan	58,70%	9/9	30%	17,61	40%	40	57,61
502	Kota Makassar	82,50%	8/9	30%	24,75	40%	35,56	60,31
503	Kota Palopo	10,53%	8/9	30%	3,16	40%	35,56	38,72
504	Kota Parepare	18,52%	3/9	30%	5,56	40%	13,33	18,89
505	Kabupaten Luwu Utara	47,06%	4/9	30%	14,12	40%	17,78	31,90
506	Kabupaten Maros	32,65%	8/9	30%	9,80	40%	35,56	45,36
507	Kabupaten Enrekang	27,27%	2/9	30%	8,18	40%	8,89	17,07
508	Kabupaten Pinrang	45,45%	8/9	30%	13,64	40%	35,56	49,20
509	Kabupaten Sinjai	25,64%	8/9	30%	7,69	40%	35,56	43,25
510	Kabupaten Bantaeng	40,00%	7/9	30%	12,00	40%	31,11	43,11
511	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	66,67%	6/9	30%	20,00	40%	26,67	46,67
512	Kabupaten Sidenreng Rappang	28,57%	6/9	30%	8,57	40%	26,67	35,24
513	Kabupaten Luwu	27,27%	8/9	30%	8,18	40%	35,56	43,74
514	Kabupaten Luwu Timur	28,00%	8/9	30%	8,40	40%	35,56	43,96
515	Kabupaten Gowa	53,57%	8/9	30%	16,07	40%	35,56	51,63
516	Kabupaten Bone	51,85%	8/9	30%	15,56	40%	35,56	51,12
517	Kabupaten Bulukumba	40,91%	1/9	30%	12,27	40%	4,44	16,71
518	Kabupaten Kepulauan Selayar	41,67%	4/9	30%	12,50	40%	17,78	30,28
519	Kabupaten Takalar	12,50%	7/9	30%	3,75	40%	31,11	34,86
520	Kabupaten Soppeng	70,00%	9/9	30%	21,00	40%	40	61,00
521	Kabupaten Wajo	0,00%	5/9	30%	0,00	40%	22,22	22,22
522	Kabupaten Toraja Utara	50,00%	8/9	30%	15,00	40%	35,56	50,56
523	Kabupaten Barru	42,86%	8/9	30%	12,86	40%	35,56	48,42
524	Kabupaten Jeneponto	35,29%	3/9	30%	10,59	40%	13,33	23,92
525	Kabupaten Tana Toraja	0,00%	0/9	30%	0,00	40%	0	0,00
526	Provinsi Sulawesi Tenggara	56,41%	9/9	30%	16,92	40%	40	56,92
527	Kota Kendari	61,90%	8/9	30%	18,57	40%	35,56	54,13
528	Kota Bau-Bau	26,92%	8/9	30%	8,08	40%	35,56	43,64
529	Kabupaten Buton	38,89%	8/9	30%	11,67	40%	35,56	47,23
530	Kabupaten Buton Utara	110,00%	8/9	30%	30,00	40%	35,56	65,56
531	Kabupaten Konawe Selatan	80,00%	9/9	30%	24,00	40%	40	64,00
532	Kabupaten Konawe Utara	0,00%	5/9	30%	0,00	40%	22,22	22,22
533	Kabupaten Wakatobi	16,67%	8/9	30%	5,00	40%	35,56	40,56
534	Kabupaten Bombana	37,04%	8/9	30%	11,11	40%	35,56	46,67
535	Kabupaten Kolaka Utara	63,64%	8/9	30%	19,09	40%	35,56	54,65
536	Kabupaten Muna	0,00%	8/9	30%	0,00	40%	35,56	35,56
537	Kabupaten Kolaka	45,45%	5/9	30%	13,64	40%	22,22	35,86
538	Kabupaten Konawe	25,00%	8/9	30%	7,50	40%	35,56	43,06
539	Kabupaten Kolaka Timur	50,00%	8/9	30%	15,00	40%	35,56	50,56

Penilaian Sementara Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Sementara Tahun 2024
Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dan Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ

No	Nama K/L/PD	Persentase Keterisian Formasi	Tingkat Kematangan UKPBJ	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ		Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ		Tota Nilai
				Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 4 x 7	7 = 6 + 8
540	Kabupaten Konawe Kepulauan	17,65%	8/9	30%	5,30	40%	35,56	40,86
541	Kabupaten Muna Barat	110,00%	8/9	30%	30,00	40%	35,56	65,56
542	Kabupaten Buton Tengah	40,00%	9/9	30%	12,00	40%	40	52,00
543	Kabupaten Buton Selatan	9,09%	8/9	30%	2,73	40%	35,56	38,29
544	Provinsi Gorontalo	34,88%	9/9	30%	10,46	40%	40	50,46
545	Kota Gorontalo	33,33%	8/9	30%	10,00	40%	35,56	45,56
546	Kabupaten Bone Bolango	0,00%	8/9	30%	0,00	40%	35,56	35,56
547	Kabupaten Pohuwato	19,23%	8/9	30%	5,77	40%	35,56	41,33
548	Kabupaten Boalemo	60,00%	8/9	30%	18,00	40%	35,56	53,56
549	Kabupaten Gorontalo Utara	42,86%	7/9	30%	12,86	40%	31,11	43,97
550	Kabupaten Gorontalo	24,14%	9/9	30%	7,24	40%	40	47,24
551	Provinsi Sulawesi Barat	59,09%	8/9	30%	17,73	40%	35,56	53,29
552	Kabupaten Mamuju	40,00%	8/9	30%	12,00	40%	35,56	47,56
553	Kabupaten Polewali Mandar	38,71%	8/9	30%	11,61	40%	35,56	47,17
554	Kabupaten Majene	60,00%	4/9	30%	18,00	40%	17,78	35,78
555	Kabupaten Pasangkayu	40,00%	3/9	30%	12,00	40%	13,33	25,33
556	Kabupaten Mamasa	0,00%	1/9	30%	0,00	40%	4,44	4,44
557	Kabupaten Mamuju Tengah	20,00%	7/9	30%	6,00	40%	31,11	37,11
558	Provinsi Maluku	57,14%	9/9	30%	17,14	40%	40	57,14
559	Kota Ambon	4,55%	8/9	30%	1,37	40%	35,56	36,93
560	Kota Tual	25,00%	6/9	30%	7,50	40%	26,67	34,17
561	Kabupaten Buru	0,00%	0/9	30%	0,00	40%	0	0,00
562	Kabupaten Maluku Tenggara	8,33%	7/9	30%	2,50	40%	31,11	33,61
563	Kabupaten Seram Bagian Barat	28,00%	8/9	30%	8,40	40%	35,56	43,96
564	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	0,00%	0/9	30%	0,00	40%	0	0,00
565	Kabupaten Seram Bagian Timur	40,00%	8/9	30%	12,00	40%	35,56	47,56
566	Kabupaten Maluku Tengah	6,06%	7/9	30%	1,82	40%	31,11	32,93
567	Kabupaten Kepulauan Aru	70,00%	3/9	30%	21,00	40%	13,33	34,33
568	Kabupaten Buru Selatan	26,09%	1/9	30%	7,83	40%	4,44	12,27
569	Kabupaten Maluku Barat Daya	0,00%	3/9	30%	0,00	40%	13,33	13,33
570	Provinsi Maluku Utara	60,00%	9/9	30%	18,00	40%	40	58,00
571	Kota Ternate	20,00%	9/9	30%	6,00	40%	40	46,00
572	Kota Tidore Kepulauan	23,08%	9/9	30%	6,92	40%	40	46,92
573	Kabupaten Halmahera Utara	7,14%	3/9	30%	2,14	40%	13,33	15,47
574	Kabupaten Halmahera Tengah	0,00%	1/9	30%	0,00	40%	4,44	4,44
575	Kabupaten Halmahera Selatan	0,00%	7/9	30%	0,00	40%	31,11	31,11
576	Kabupaten Halmahera Barat	10,00%	2/9	30%	3,00	40%	8,89	11,89
577	Kabupaten Halmahera Timur	22,22%	8/9	30%	6,67	40%	35,56	42,23
578	Kabupaten Kepulauan Sula	0,00%	0/9	30%	0,00	40%	0	0,00
579	Kabupaten Pulau Morotai	5,88%	4/9	30%	1,76	40%	17,78	19,54
580	Kabupaten Pulau Taliabu	36,84%	8/9	30%	11,05	40%	35,56	46,61
581	Provinsi Papua	62,71%	9/9	30%	18,81	40%	40	58,81
582	Provinsi Papua Pegunungan	0,00%	4/9	30%	0,00	40%	17,78	17,78
583	Provinsi Papua Selatan	0,00%	4/9	30%	0,00	40%	17,78	17,78
584	Kota Jayapura	19,05%	9/9	30%	5,72	40%	40	45,72
585	Kabupaten Merauke	10,00%	9/9	30%	3,00	40%	40	43,00
586	Kabupaten Asmat	0,00%	4/9	30%	0,00	40%	17,78	17,78
587	Kabupaten Jayapura	0,00%	5/9	30%	0,00	40%	22,22	22,22
588	Kabupaten Keerom	0,00%	2/9	30%	0,00	40%	8,89	8,89

Penilaian Sementara Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Sementara Tahun 2024
Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dan Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ

No	Nama K/L/PD	Persentase Keterisian Formasi	Tingkat Kematangan UKPBJ	Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ		Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ		Tota Nilai
				Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8 = 4 x 7	7 = 6 + 8
589	Kabupaten Mappi	0,00%	2/9	30%	0,00	40%	8,89	8,89
590	Kabupaten Mimika	8,00%	4/9	30%	2,40	40%	17,78	20,18
591	Kabupaten Nabire	0,00%	3/9	30%	0,00	40%	13,33	13,33
592	Kabupaten Puncak Jaya	0,00%	7/9	30%	0,00	40%	31,11	31,11
593	Kabupaten Biak Numfor	0,00%	6/9	30%	0,00	40%	26,67	26,67
594	Kabupaten Boven Digoel	0,00%	3/9	30%	0,00	40%	13,33	13,33
595	Kabupaten Dogiyai	0,00%	2/9	30%	0,00	40%	8,89	8,89
596	Kabupaten Jayawijaya	0,00%	1/9	30%	0,00	40%	4,44	4,44
597	Kabupaten Kepulauan Yapen	0,00%	5/9	30%	0,00	40%	22,22	22,22
598	Kabupaten Lanny Jaya	0,00%	3/9	30%	0,00	40%	13,33	13,33
599	Kabupaten Mamberamo Raya	0,00%	0/9	30%	0,00	40%	0	0,00
600	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,00%	2/9	30%	0,00	40%	8,89	8,89
601	Kabupaten Paniai	0,00%	0/9	30%	0,00	40%	0	0,00
602	Kabupaten Pegunungan Bintang	0,00%	2/9	30%	0,00	40%	8,89	8,89
603	Kabupaten Puncak	0,00%	7/9	30%	0,00	40%	31,11	31,11
604	Kabupaten Sarmi	0,00%	1/9	30%	0,00	40%	4,44	4,44
605	Kabupaten Supiori	0,00%	1/9	30%	0,00	40%	4,44	4,44
606	Kabupaten Tolikara	0,00%	1/9	30%	0,00	40%	4,44	4,44
607	Kabupaten Waropen	0,00%	0/9	30%	0,00	40%	0	0,00
608	Kabupaten Yahukimo	0,00%	0/9	30%	0,00	40%	0	0,00
609	Kabupaten Yalimo	0,00%	0/9	30%	0,00	40%	0	0,00
610	Kabupaten Deiyai	0,00%	7/9	30%	0,00	40%	31,11	31,11
611	Kabupaten Intan Jaya	0,00%	7/9	30%	0,00	40%	31,11	31,11
612	Kabupaten Nduga	0,00%	0/9	30%	0,00	40%	0	0,00
613	Provinsi Papua Barat	0,00%	7/9	30%	0,00	40%	31,11	31,11
614	Provinsi Papua Barat Daya	0,00%	5/9	30%	0,00	40%	22,22	22,22
615	Provinsi Papua Tengah	0,00%	3/9	30%	0,00	40%	13,33	13,33
616	Kota Sorong	0,00%	4/9	30%	0,00	40%	17,78	17,78
617	Kabupaten Manokwari	0,00%	7/9	30%	0,00	40%	31,11	31,11
618	Kabupaten Fakfak	8,70%	7/9	30%	2,61	40%	31,11	33,72
619	Kabupaten Kaimana	0,00%	2/9	30%	0,00	40%	8,89	8,89
620	Kabupaten Raja Ampat	0,00%	7/9	30%	0,00	40%	31,11	31,11
621	Kabupaten Sorong	0,00%	6/9	30%	0,00	40%	26,67	26,67
622	Kabupaten Sorong Selatan	0,00%	0/9	30%	0,00	40%	0	0,00
623	Kabupaten Teluk Bintuni	0,00%	3/9	30%	0,00	40%	13,33	13,33
624	Kabupaten Tambrauw	0,00%	0/9	30%	0,00	40%	0	0,00
625	Kabupaten Maybrat	0,00%	0/9	30%	0,00	40%	0	0,00
626	Kabupaten Teluk Wondama	0,00%	5/9	30%	0,00	40%	22,22	22,22
627	Kabupaten Manokwari Selatan	0,00%	5/9	30%	0,00	40%	22,22	22,22
628	Kabupaten Pegunungan Arfak	0,00%	6/9	30%	0,00	40%	26,67	26,67